BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam tesis mengenai Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) di Kabupaten Serang, berikut adalah kesimpulan yang dirinci sesuai dengan 6 aspek teori implementasi Van Meter dan Van Horn.

Pertama: Ukuran dan tujuan kebijakan. Tujuan makro program K3P untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan non-formal pada dasarnya telah dipahami. Namun, pada tingkat pelaksana, tujuan ini ditafsirkan secara bervariasi; sebagian fokus untuk mengurangi angka putus sekolah, sementara yang lain lebih menekankan pada pemberdayaan ekonomi dan keterampilan praktis. Ukuran keberhasilan kebijakan belum terdefinisi secara operasional dan cenderung ambigu, sehingga pelaksana lebih mengandalkan intuisi daripada indikator kinerja yang terstandar. Hal ini mengakibatkan implementasi yang tidak seragam dan kesenjangan hasil di berbagai wilayah.

Kedua: Sumber daya. Sumber daya menjadi salah satu titik lemah paling signifikan dalam implementasi program K3P. Dari sisi sumber daya manusia, banyak tutor berstatus honorer dengan insentif yang sangat minim (sekitar Rp300.000 per bulan) dan sering terlambat, yang berdampak pada motivasi kerja. Dari segi pendanaan, program ini sangat bergantung pada anggaran daerah yang terbatas dan tidak konsisten. Akibatnya, banyak PKBM tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas permanen, dan harus menggunakan fasilitas umum atau rumah warga. Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tutor dan pengelola juga masih sangat terbatas.

Ketiga: karakteristik agen pelaksana. Karakteristik PKBM sebagai agen pelaksana di Kabupaten Serang sangat beragam. Sebagian kecil telah memiliki manajemen yang baik, namun mayoritas masih mengandalkan sistem manual dan belum terdigitalisasi karena keterbatasan perangkat dan SDM. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh komitmen dan karakter personal pengelola yang visioner, yang mampu mengatasi keterbatasan sumber daya. Selain itu, PKBM yang memiliki jaringan sosial kuat dan relasi baik dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat cenderung lebih berhasil dan berkembang.

Keempat: Sikap/ kecenderungan para pelaksana. Sikap para pelaksana menunjukkan dualisme. Di satu sisi, sebagian besar tutor dan pengelola menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi, didorong oleh nilai-nilai personal dan keyakinan untuk memberdayakan masyarakat, meskipun dengan insentif yang minim. Di sisi lain, terdapat pelaksana yang bersikap minimalis dan hanya menjalankan program sebagai pemenuhan tuntutan administratif, sehingga minim inovasi. Sikap positif dari pejabat pemerintah lokal, seperti kepala desa atau camat, juga menjadi faktor krusial yang menentukan kuat atau tidaknya dukungan logistik dan moral terhadap program di tingkat desa.

Kelima: Komunikasi antar organisasi. Komunikasi antarorganisasi menjadi salah satu kendala serius dalam implementasi program. Komunikasi vertikal dari Dinas Pendidikan ke PKBM seringkali lambat dan informasinya tidak sampai secara utuh ke level tutor, terutama terkait perubahan kurikulum. Sementara itu, komunikasi horizontal antar-PKBM hampir tidak ada, menyebabkan setiap lembaga berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi dan kolaborasi untuk berbagi praktik baik atau sumber daya. Hubungan dengan pemerintah desa juga lebih bersifat personal daripada institusional, sehingga dukungan sangat bergantung pada individu kepala desa.

Keenam: Lingkungan ekonomi, social, dan politik. Lingkungan eksternal sangat memengaruhi implementasi program K3P. Secara ekonomi, peserta program yang berasal dari kelompok marginal harus memprioritaskan pekerjaan harian, sehingga waktu belajar menjadi terbatas. Secara sosial, stigma bahwa pendidikan non-formal adalah "sekolah kelas dua" masih kuat di masyarakat, yang berdampak pada rendahnya partisipasi dan tingginya angka putus belajar. Dari sisi politik, meskipun ada komitmen dari pemerintah daerah dalam bentuk alokasi anggaran, dukungan ini masih terbatas dan belum diperkuat dengan regulasi turunan atau insentif yang jelas untuk PKBM berkinerja baik.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program Kesetaraan, Keaksaraan, serta Kursus dan Pelatihan pada pendidikan kesetaraan di Kabupaten Serang tahun 2024, beberapa saran dapat disampaikan.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung pengadaan dan perbaikan sarana prasarana di PKBM agar sesuai dengan standar layanan pendidikan nonformal.
2. Dinas Pendidikan harus secara aktif memperluas jangkauan PKBM, terutama di wilayah-wilayah yang belum terlayani, serta memfasilitasi proses akreditasi bagi PKBM yang masih belum terakreditasi.
3. Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan kesetaraan sebagai jalan alternatif untuk mengembangkan potensi diri dan memperoleh kesempatan kerja.

4. Diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah, pengelola PKBM, tokoh masyarakat, dan pihak swasta untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program.
5. Perlu adanya kebijakan afirmatif yang lebih berpihak pada pendidikan nonformal agar keberlanjutan program K3P terjamin dan mampu menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Serang.

5.3. Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, direkomendasikan agar penyelenggaraan program Keetaraa, Keaksaraan, serta Kursus dan Pelatihan dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Serang diarahkan pada peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang mendukung pendanaan yang berkelanjutan dan alokasi sumber daya yang tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan layanan pendidikan kesetaraan. Lembaga pelaksana program disarankan untuk menjalin kemitraan yang lebih erat dengan sektor swasta, organisasi masyarakat, dan dunia usaha agar kegiatan pelatihan dapat lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data yang terintegrasi, guna memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi peserta didik. Rekomendasi lainnya adalah perlunya inovasi dalam metode pembelajaran, termasuk pemanfaatan teknologi digital, untuk menjangkau peserta didik di wilayah terpencil serta menyesuaikan

dengan karakteristik belajar orang dewasa. Dengan berbagai langkah tersebut, implementasi program pendidikan kesetaraan di Kabupaten Serang dapat menjadi lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.